

# PERAN DAN TANTANGAN FBNGO HUMANITARIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA YANG MULTIKULTUR (Studi atas *Muslim Aid* dan *Catholic Relief Services*)

**Suhadi**

Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: suhadia@yahoo.com

## **Abstrak**

Sampai saat ini masih cukup banyak NGO internasional yang bekerja untuk Indonesia, terutama setelah belakangan ini banyak terjadi bencana alam. Salah satu tipe NGO tersebut adalah NGO yang berdasarkan agama atau *faith based* NGO (FBNGO). Tulisan ini mengkaji dua FBNGO: Catholic Relief Services (CRS) dan Muslim Aid (MA). Pertanyaan yang diajukan adalah, *pertama*, bagaimana taxonomi dua FBNGO yang bekerja dalam bidang humanitarian tersebut? *Kedua*, apa tantangan yang dihadapi oleh CRS dan MA dalam mengimplementasikan program-programnya dalam konteks Indonesia yang multikultur dan bagaimana strateginya untuk mengatasi tantangan itu? Kesimpulannya, baik MA maupun CRS dapat diklasifikasikan dalam taxonomi *sintesis humanitarian*. Identitas kelembagaan dua institusi tersebut adalah religius *cum* humanis. Kedua lembaga ini juga memegang kuat prinsip-prinsip dan standar-standar humanitarian internasional, termasuk dalam berinteraksi dengan para penyintas. Meskipun demikian, tidak berarti CRS dan MA tidak menghadapi tantangan di lapangan, termasuk yang berkaitan dengan identitas agama yang sensitif. Oleh karena itu, dua FBNGO ini terdorong mengembangkan strategi bagaimana mengatasi masalah akibat sensitifitas agama yang kadang-kadang muncul di lapangan.

### **Abstract**

*There are many international NGOs working for Indonesia, especially after the natural disasters have occurred during the last decade. One type of such NGO is faith-based NGO (FBNGO). This paper examines two FBNGOs: Catholic Relief Services (CRS) and Muslim Aid (MA). The questions are how is the taxonomy of the two FBNGOs working for humanitarianism? Then, what are the challenges faced by CRS and MA in implementing their programs in multicultural Indonesia society and how is the strategy to overcome those challenges? In conclusion, both MA and CRS can be classified as the humanitarian synthesis taxonomy. Institutional identity of the two institutions are religious cum humanism. Both institutions also hold strong principles and standards of international humanitarianism including in interacting with the survivors. However, it does not mean CRS and MA do not face challenges in the field, especially those relating to sensitive religious identity. Therefore, these two FBNGO encouraged to develop strategies to overcome problems due to religious sensitivities that sometimes appear in the field.*

**KeyWords:** *humanitarianism, taxonomy, humanitarian synthesis, faith-based non-governmental organization (FBNGO)*

### **A. Pendahuluan**

Dengan pendapatan Perkapita Rp 36,5 juta atau USD 3.499,<sup>1</sup> Indonesia masih dikategorikan sebagai salah satu negara berkembang atau belum mencapai tahap sebagai negara maju. Padahal bila kita lihat perkembangan penduduk dan ekonomi di sebagian kota besar di Indonesia, kita akan terkesan bahwa Indonesia pantas disebut sebagai negara maju. Namun tidak dapat kita pungkiri pembangunan di banyak daerah di negeri ini masih sangat memprihatinkan. Diantara persoalan pembangunan di Indonesia adalah terdapatnya jarak yang lebar antara pembangunan di sebagian daerah (terutama di Jawa) dengan daerah lainnya (pada umumnya di luar Jawa). Keadaan pembangunan yang belum merata mengakibatkan sebagian daerah di Indonesia masih mengalami berbagai kekurangan. Keadaan ini mendorong Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) ikut membantu pembangunan di daerah-daerah itu, sebut saja misalnya di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik 2013.

Selain masih belum majunya sebagian wilayah Indonesia, keberadaan bencana alam yang terjadi secara beruntun di Indonesia sekitar satu dekade belakangan ini juga mendorong semakin banyak lembaga internasional bekerja dalam bidang bantuan penanganan bencana (*disaster relief*) di Indonesia. Pada tahun 2011 Dirjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri Indonesia, menerbitkan direktori yang mendiskripsikan 109 OINP yang saat ini bekerja di Indonesia. Banyak dari lembaga humaniter internasional tersebut yang bekerja dalam bidang bantuan penanganan bencana. Sebagian dari lembaga internasional tersebut telah beroperasi di Indonesia sejak sebelum tahun 1970an, namun sebagian lain mulai aktif bersamaan dengan peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004.

Dari perspektif studi agama, lembaga internasional tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi dua: lembaga humaniter “sekuler” dan lembaga humaniter berbasis “agama”. Lembaga yang disebut terakhir sering disebut dengan istilah “*faith-based non-government organization* (FBNGO)”. Istilah lain yang bisa dibandingkan dengan FBNGO adalah *faith-based organization* (FBO). Pada umumnya istilah FBNGO lebih sering digunakan daripada FBO. Julia Berger, sebagaimana dikutip Kemkens, mendefinisikan FBNGO sebagai berikut.

*“...formal organizations whose identity and mission are self-consciously derived from the teachings of one or more religious or spiritual traditions and which operates on a nonprofit, independent, voluntary basis to promote and realize collectively articulated ideas about the public good at the national or international level”<sup>2</sup>*

Dari definisi di atas, aspek agama dalam FBNGO terletak pada aspek “identitas dan misi yang disadari berakar pada ajaran satu atau lebih tradisi agama atau spiritualitas”. Contoh NGO internasional “sekuler” yang aktif di Indonesia adalah Hivos Foundation, International Relief and Development (IRD), Hencicap International, Plan International, The Asia Foundation, dan lain-lain. Sementara itu

---

<sup>2</sup> Kemkens, L. (2013). *On the Connection between Religion and Disaster: Literature Review*, Yogyakarta: CRCS UGM, hlm. 85.

FBNGO internasional yang beroperasi di Indonesia mencerminkan dua kekuatan agama terbesar secara global: Kristen dan Islam.<sup>3</sup> Contoh dari FBO internasional berbasis Kristen yang aktif di Indonesia antara lain World Vision, Catholic Charities, Catholic Relief Services (CRS), Christian Aid, Church World Service (CWS), dan Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO). Sedangkan FBO internasional yang berbasis Islam seperti Islamic Relief Worldwide, Muslim Aid, the International Islamic Relief Organisation (IIRO), World Assembly of Muslim Youth (WAMY), dan Asian Muslim Charity Fund (AMCF).

Keberadaan FBNGO selama ini sangat mewarnai dunia humaniter internasional. FBNGO telah mampu memberikan manfaat besar bagi aksi-aksi kemanusiaan dan memperkaya corak gerakan kemanusiaan tersebut. Meskipun demikian hal itu tidak berarti FBNGO bebas dari masalah. Identitas dasarnya sebagai lembaga humaniter keagamaan membuat FBNGO menghadapi tantangan, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultur. Tantangan biasanya muncul ketika terjadi perbedaan pemahaman (baca: kecurigaan) antara FBNGO internasional yang berbasis agama tertentu dengan warga penerima manfaat FBNGO internasional tersebut yang berbeda identitas agama. Ketegangan kadang juga muncul akibat persaingan antara FBNGO yang berbeda latar agama atau karena berbeda latar paham keagamaan.

Di Kabul Afghanistan, misalnya, umat Muslim, khususnya dari kelompok Taliban memaksa keluar semua FBNGO internasional berbasis agama Kristen, sebab mereka dicurigai melakukan evangelisasi penduduk Muslim.<sup>4</sup> Kasus sejenis tidak jarang terjadi di Indonesia. Pada saat terjadi penanganan bencana tsunami di Aceh tahun 2005, WorldHelp, salah satu FBNGO berbasis Kristen banyak menuai protes karena dicurigai melakukan proselitisasi anak-anak Aceh yang

---

<sup>3</sup> Dalam catatan Barret dan Johnson (2002) pemeluk agama Kristen di dunia sebesar 33% (1,9 milyar jiwa) dan pemeluk agama Islam sebesar 19,6% (1,1 milyar jiwa).

<sup>4</sup> Thaut L.C. (2009). "The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies: Constructing the Taxonomy". *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 20, No. 4 (December 2009), hlm. 321.

beragama Islam.<sup>5</sup> Dalam skala yang lebih kecil, masalah sejenis di luar konteks FBNGO juga muncul dalam peristiwa penanganan penyintas (*survivor*) erupsi gunung Merapi tahun 2005 di Yogyakarta. Pada saat itu sejumlah 98 warga dari lereng Merapi yang mengungsi di gereja Ganjuran Bantul Yogyakarta diusir oleh sekelompok massa umat Muslim karena gereja tersebut dicurigai akan melakukan Kristenisasi umat Muslim yang mengungsi di situ.<sup>6</sup> Sebaliknya, kecurigaan serupa juga terjadi di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, misalnya Papua, terhadap lembaga amal dan dakwah Islam. Bantuan kemanusiaan dan dakwah Islam di bumi Papua dicurigai oleh aktivis gereja di Papua sebagai bentuk proses Islamisasi Papua.<sup>7</sup>

Sementara itu diantara prinsip umum yang relatif diterima secara internasional dalam bidang humanitarian adalah prinsip netralitas dan imparialitas. Netralitas biasanya dikedepankan dalam konteks konflik atau perang. Lembaga humaniter diharuskan bersikap netral yang berarti “absen” (*abstention*) atau menempatkan dirinya bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam pertikaian yang sedang terjadi. Dengan prinsip netralitas, kehadiran lembaga humaniter dalam peristiwa konflik diharapkan mendorong perdamaian dan tidak sebaliknya, memperkeruh konflik. Sedangkan prinsip *impartial* diartikan tidak memihak. Artinya, lembaga humaniter tidak memihak salah satu atau lebih dari kelompok sasaran yang sedang dibantu. Bantuan kemanusiaan yang diberikan didasarkan pada kriteria objektif dari kebutuhan para penyintas, bukan atas dasar pertimbangan lain. Dengan bahasa yang biasa dipakai dalam bidang humanitarian, dasar pertimbangan itu mengesampingkan identitas ras, agama, dan afiliasi politik (*regardless race, religion or political affiliations*).

Keterlibatan lembaga internasional dalam suatu negara tertentu tidak dapat dilepaskan dari proses globalisasi. Di dalam era global yang semakin kuat, batas ruang dan wilayah semakin mengecil.

---

<sup>5</sup> Suhadi, C. dan E. Rubi. (2012). “Agama atau Kemanusiaan? Analisa Diskursus Dalam Bencana Alam di Media Cyber” dalam Indiyanto dan Kuswanjono. *Respons Masyarakat Lokal atas Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya*. Yogyakarta: CRCs dan Mizan, hlm. 207.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Wenda, T. (2013) “Islamisasi Papua Semakin Gencar, Gereja Berdiam Diri”, <http://suarabaptis.blogspot.com/2013/05/islamisasi-papua-semakin-gencar-gereja.html>, diakses pada 27 Maret 2014.

Fenomena ini sering disebut dengan istilah berkembangnya “*global village*”.<sup>8</sup> Fenomena *global village* mempersatukan dan mendekatkan kelompok sosial dengan mengabaikan batas geografi (*borderless world*). Dalam bidang humanitarian, *global village* mendorong solidaritas yang semakin intensif lintas batas geografi dan budaya. Kemajuan teknologi dan komunikasi turut mendorong solidaritas tersebut semakin spontan dan cepat, terutama dalam kasus-kasus solidaritas terhadap penyintas atau korban bencana alam.

Meskipun demikian masyarakat pada umumnya dan penyintas atau korban bencana alam secara khusus bukan aktor yang pasif dalam *global village* ini. Mereka adalah aktor yang aktif dalam merespons sesuatu dari luar kelompok sosialnya. Masalah ini merupakan poin menarik yang penting dikaji secara empiris. Dalam kaitannya dengan gerakan humanitarian di Indonesia, pada kenyatannya FBNGO internasional tidak saja memiliki peran kemanusiaan, tetapi sekaligus menghadapi tantangan di masyarakat sebagai konsekuensi dari multikulturalisme masyarakat Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertanyaan dan Metode**

Untuk membatasi kajian, penelitian ini memfokuskan pada studi perbandingan terhadap Muslim Aid (MA) dan Catholic Relief Services (CRS). Mempertimbangkan fokus kajian dan uraian pendahuluan di atas, penelitian fokus pada beberapa pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana taxonomi FBNGO yang bekerja di wilayah humanitarian. Pertanyaan ini diperlukan untuk menentukan posisi MA dan CRS dalam taxonomi tersebut. *Kedua*, apa tantangan yang dihadapi oleh CRS dan MA dalam mengimplementasikan program-programnya dalam konteks Indonesia yang multikultur dan bagaimana strateginya untuk mengatasi tantangan tersebut.

Selain melakukan studi pustaka dan studi dokumen terkait pertanyaan penelitian di atas, penulis melakukan dua kegiatan untuk mengumpulkan data dan mengasah perspektif. *Pertama*,

---

<sup>8</sup> McLuhan, M. (2011). *The Gutenberg Galaxy*. Toronto: The University of Toronto Press.

penulis terlibat aktif dalam workshop “Christian-Muslim Disaster Preparedness and Response Meeting” yang diadakan oleh Center for Disaster Risk Management and Community Development Studies, Universitas HKBP Nommensen Medan bekerjasama dengan the Lutheran World Federation dan Humanitarian Forum Indonesia pada tanggal 11 Juni 2014 di Medan. *Kedua*, penulis melakukan wawancara mendalam dengan empat orang staf utama Muslim Aid dan Catholic Relief Services pada pertengahan tahun 2014. Wawancara dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta.

## 2. Taxonomi Agama-Humanitarian

Kristen dan Islam merupakan dua agama misi atau *dakwah*. Meskipun dua istilah ini memiliki banyak makna, namun baik misi atau *dakwah* sering disepadankan artinya sebagai upaya untuk mengundang pemeluk agama lain atau orang yang tidak beragama menjadi Islam atau Kristen. Dalam konteks humanitarian, perspektif *dakwah* atau misi ini menjadikan gerakan humaniter mereka tidak jarang sulit konsisten memegang prinsip *impartial*. Sebab *dakwah* atau misi menjadikan aktor atau lembaga humanitarian tidak dapat melepaskan keberpihakan keagamaan yang mempengaruhi setiap pilihan atau keputusan dalam menjalankan aksi kemanusiaannya.

Dalam pengalaman umat Kristen abad 17 sampai pertengahan abad 20, gereja, lembaga amal Kristen dan lembaga pelayanan gereja (*diaconia*) masih memiliki prinsip mengutamakan pelayanan kepada orang-orang miskin anggota kongregasinya dibanding kelompok sosial lain di luar kongregasinya. Hingga kini, bagi kelompok tertentu di kalangan umat Kristen masih ada yang sulit memisahkan antara sisi humanitarian dengan kepentingan kelompok agamanya, atau bahkan lebih sempit, kepentingan kongregasinya. Dilema sering muncul apakah mereka harus mempromosikan nilai-nilai humanitarian dengan mengabaikan sentimen primordial sektarian, atau memberikan prioritas terhadap anggota kelompoknya. Perdebatan dan wacana tentang bagaimana kelompok misionaris mencirikan karya sosial mereka dan misi humaniter masih berlangsung hingga saat ini.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Latief, H. (2012) *Islamic Charities and Social Activism Welfare, Dakwah and Politics*

Sebagai bandingan, hal itu mirip dengan pengalaman umat Muslim. *Dakwah* yang semula diartikan sebagai menyebarkan agama Islam, kemudian berkembang antara lain menjadi upaya pembangunan masyarakat (*community development*)<sup>10</sup> Pertemuan antara misi menyebarkan agama Islam dan pembangunan masyarakat, sebagai konsekuensinya, tidak jarang menjadikan keduanya satu paket. Pada gilirannya, bercampurnya unsur humanitarian dengan *dakwah* dan misi yang mengedepankan sektarianisme kelompok agama kemudian memicu persinggungan dan kompetisi antara FBNGO berbasis Islam dan Kristen.

Meskipun demikian Hilman Latief dalam desertasinya di Universitas Utrecht Belanda dengan judul *Islamic Charities and Social Activism Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* telah memberikan ancaman-ancang bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan. Menurutnya, hal itu dapat diatasi apabila tiap lembaga mampu mentransformasikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan yang mereka pegangi ke dalam nilai-nilai universal yang diterima dalam konsep humanitarian. Pola hubungan antar FBNGO Islam dan Kristen dapat mewujudkan dalam tiga bentuk hubungan. Pertama, *kompetisi* yang mengedepankan konflik, persaingan negatif dan sikap saling curiga. Kedua, *koeksistensi* yang berupa sikap acuh tak acuh (*ignorance*), yaitu meskipun berupaya menghindari konflik, tetapi tidak ada keinginan untuk saling bekerjasama. Ketiga, *kerjasama*, yaitu meskipun antara FBO berlatar Islam dan Kristen memiliki spirit agama yang berbeda namun mereka membuka diri dan mempraktikkan kerjasama.<sup>11</sup> Kerjasama antara FBNGO berlatar Kristen dan Islam bukan hal baru. Sebagai contohnya di tingkat internasional terdapat kerjasama antara United Methodist Committee on Relief (UMCOR) yang berbasis di Amerika dan Muslim Aid yang berbasis di Inggris pada Juni 2007 yang menggalang dana bersama untuk menyokong aksi humanitarian di

---

in *Indonesia*. Desertasi doctoral di Universitas Utrecht Belanda. Utrecht: Universitas Utrecht, hlm. 56.

<sup>10</sup> Meuleman, J. (2011) "Dakwah, competition for authority, and development". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, No. 2/3, hlm. 236.

<sup>11</sup> Latief, H. (2012) *Islamic Charities and Social Activism Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia*. Desertasi doctoral di Universitas Utrecht Belanda. Utrecht: Universitas Utrecht, hlm 50.



Indonesia dan Sri Lanka. Uskup dari *Church of England* mengunjungi Aceh pada Juli 2005 dan meresmikan secara bersama-sama perumahan baru untuk para korban tsunami yang didanai oleh Muslim Aid.

Mempertimbangkan kompleksitas identitas FBNGO, di sini kita penting menyimak taxonomi (klasifikasi) yang dibuat Laura C. Thaut. Dosen jurusan Ilmu Politik, Universitas Minnesota Amerika ini memberikan tawaran konseptual yang menarik tentang pola hubungan antara unsur teologi dengan unsur humanitarian dari *faith-based agencies*. Meskipun kajian Thaut hanya menyangkut kasus institusi berbasis Kristen, namun konsepnya juga dapat kita pakai untuk institusi agama lain.

Dari hasil kajiannya, Thaut menawarkan empat taxonomi.<sup>12</sup> *Pertama*, humanitarian akomodatif (*accomodative-humanitarianism*). Dalam humanitarian akomodatif, kelompok humanitarian berbasis agama memiliki akar agama, tetapi implementasi dari gerakan humanitariannya tidak didesain sama sekali untuk memenuhi agenda keagamaan. Dari sisi misinya, lembaga humanitarian akomodatif tidak menekankan secara eksplisit misi keagamaannya. Agama atau iman lebih ditafsirkan atau dimaknai sebagai spirit humanisme yang meyakini persaudaraan sejati semua manusia. Dalam iman dan kehendak baik (*good will*), manusia tidak dipandang dari caranya beribadah.

Lalu apa maksud identitas agama yang melekat dalam kategori humanitarian akomodatif ini? Thaut menyebut di situ agama dijadikan sebagai spirit atau motivasi untuk pelayanan kemanusiaan, atau perannya hanya sakadar sebagai identitas historis dari FBNGO bersangkutan.<sup>13</sup> Dalam praktiknya, FBNGO dalam klasifikasi ini sangat menghindari inkorporasi (penggabungan) kepentingan agama dengan unsur humanitarian, termasuk setiap upaya proselitisasi (pengagamaan, konversi agama) bersamaan dengan aksi kemanusiaan. Thaut memberikan contoh di kalangan FBNGO Kristen dalam kategori ini seperti Christian Aid dan Heifer International.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Thaut L.C. (2009). "The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies: Constructing the Taxonomy". *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 20, No. 4 (December 2009), hlm. 328-346.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 333.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 331.

*Kedua*, humanitarian sintesis (*synthesis-humanitarianism*). Dalam kategori ini sebuah FBNGO memiliki orientasi keagamaan yang sangat jelas dengan menempatkan agama sebagai motivasi utama dalam aksi kemanusiaannya. Meskipun agama ditempatkan cukup sentral, namun tidak memiliki semangat evangelis atau dakwah untuk mengagamakan para penyintas. Hal ini juga tercermin dari staf yang biasanya kebanyakan sama dengan identitas agama dari institusi FBNGO tersebut. Bahasa agama juga cukup mewarnai FBNGO humanitarian sintesis. Para penyintas penerima manfaat tidak disyaratkan menerima visi keagamaan dari FBNGO bersangkutan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Dalam perspektif humanitarian sintesis, aktor yang menyediakan diri sebagai pelayan kemanusiaan merepresentasikan wujud dari cinta kasih atau rahmat Tuhan. Thaut memberikan contoh dalam kategori ini antara lain adalah CRS, Church World Services, Lutheran Wolrd Services, dan Mennonite Central Committee.<sup>15</sup>

*Ketiga*, humanitarian evangelis (*evangelistic-humanitarianism*). Sebagaimana labelnya, humanitarian evangelis atau dakwah mengedepankan aspek evangelis dalam kegiatan humanitarian. Aksi penanganan bencana atau pembangunan yang dilakukan oleh FBNGO kategori ini bukan merupakan tujuan utama, tetapi, lebih untuk menyebarkan pesan agama. Dengan kata lain aktor FBNGO menyebarkan misi agama melalui aksi kemanusiannya. Baik orang atau lembaga yang mendonorkan dana untuk FBNGO serta aktivis FBNGO bersangkutan memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelenggarakan pelayanan dengan harapan sasaran atau penyintas yang menerima manfaatnya diharapkan mau menerima misi keagamaan darinya. Menurut Thaut, FBNGO Kristen yang dalam kategori ini misalnya Samaritan Purse, World Vision, dan International Mission Board of Southern Baptist Convention.<sup>16</sup>

*Keempat*, adalah kelompok humanitarian radikal (*radical non-engagement*). FBNGO yang masuk dalam kategori ini memiliki landasan ideologi keagamaan yang mengakar sangat kuat. Perbedaannya dengan

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

kategori ketiga, kategori keempat ini memiliki pandangan dan praktik humanitarian yang lebih sempit dan lebih radikal berbasis denominasi (aliran/ kelompok keagamaan). Hal ini dapat terlihat dari misi yang dijalankan terkonsentrasi hanya bagi penyintas yang memiliki afiliasi keyakinan atau aliran agama yang sama dengan organisasi ini. Apabila mereka melakukannya untuk pihak lain tujuannya tidak lain hanya untuk proselitasi kepada kelompok lain itu. Untuk meraih tujuan tersebut, staf FBNGO ini biasanya hanya dari mereka yang memiliki afiliasi aliran yang sama dengannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kuatnya peran denominasi (golongan) tertentu dalam hirarki penentuan kebijakan yang diambil. Pencarian dana pun dilakukan hanya bersumber dari anggota denominasi. Sayangnya Laura C. Thaut tidak menyebut contoh FBNGO dalam kategori terakhir ini.

Sampai di sini baik Muslim Aid maupun Catholic Relief Services, melalui kajian yang akan dijelaskan lebih detil di bawah, dapat diklasifikasikan dalam kategori kedua: humanitarian sintesis. Kesamaan kategori ini penting dikemukakan agar kita dapat menempatkan kajian perbandingan dua FBNGO berbeda latar agama ini secara proporsional.

### **3. Mengenal *Muslim Aid* dan *Catholic Relief Services***

Catholic Relief Services (CRS) berdiri jauh lebih dulu dari Muslim Aid (MA). CRS didirikan oleh para Uskup Agung dari gereja Katolik Roma di Amerika Serikat pada tahun 1943. Sementara itu MA didirikan oleh para aktivis organisasi-organisasi Muslim di Inggris setelah mereka secara bersama-sama merespon krisis kemanusiaan di Afrika pada tahun 1985. Sebagai lembaga yang berdiri di era awal perang dunia II, CRS semula fokus pada upaya membantu korban dan pengungsi perang di Eropa. Setelah perang dunia II selesai, lembaga kemanusiaan ini bergerak dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan, dan kemudian juga di bidang penanganan bencana alam dan bencana sosial (baca: konflik). Tidak jauh beda dengannya, MA awalnya aktif dalam pelayanan bagi pengungsi, misalnya di Pakistan, kemudian program-programnya berkembang ke isu pembangunan masyarakat dan juga penanganan korban bencana alam.

Di atas telah dipetakan bahwa baik MA maupun CRS merupakan lembaga dalam kategori humanitarian sitensis. Sebagai lembaga humanitarian sistesis, MA dan CRS masing-masing menempatkan teologi Islam dan Kristen sebagai prinsip, semangat, dan sumber inspirasi gerakannya. Dalam *company profile*-nya, CRS menyebut dirinya dimotivasi oleh ajaran Yesus Kristus untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan martabat kehidupan semua manusia, mengembangkan kedermawanan dan keadilan. Sebagai FBNGO berbasis Katolik yang lahir di Amerika, mereka memaknai keberadaan CRS sebagai manifestasi kasih dari masyarakat Katolik di Amerika bagi saudara dan saudari mereka, semua manusia, di seluruh dunia.<sup>17</sup> Sebanding dengan CRS, MA menyandarkan identitas institusinya dana kegiatannya pada ajaran-ajaran kemanusiaan dari Islam<sup>18</sup> Khusus bagi MA, penyandaran terhadap ajaran agama ini mempengaruhi model kategori program MA yang akan dibahas lebih detil di bawah.

Saat ini MA bekerja di sekitar 75 negara, berkantor pusat di Inggris, dan membuka kantor perkawilan (*field office*) di Bangladesh, Bosnia, Kamboja, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Somalia, Srilangka, dan Sudan. Sementara itu, CRC berpusat di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat dan kini bekerja di sekitar 93 negara. Bidang pelayanan CRS meliputi dua belas bidang, yaitu kebijakan publik, pertanian, pendidikan, tanggap darurat, makanan dan kelaparan, kesehatan, HIV/Aids, perdagangan manusia, kredit mikro, bina damai, jaring pengaman sosial, dan lain-lain. Sedangkan program MA di seputar program air dan sanitasi, pendidikan, hunian sementara dan rekonstruksi, penguatan ekonomi, *livelihood*, kesehatan, nutrisi, anak asuh, dan lain-lain.

Selain memiliki ruang gerak dalam program-program kemanusiaan pada umumnya, sebagai konsekuensi dari FBNGO, baik MA maupun CRCS mengelola program yang ada kaitannya dengan program keagamaan secara spesifik. Misalnya, MA mengelola program keislaman seperti program Ramadan, zakat maal, zakat fitrah, aqiqah, qurban, dan pembangunan sumur. Program-program yang disebut dalam kategori terakhir ini khusus dari dan untuk umat Muslim. Dari

---

<sup>17</sup> [www.crs.org](http://www.crs.org) diakses 7 Maret 2014.

<sup>18</sup> [www.muslimaid.org](http://www.muslimaid.org) diakses 10 Maret 2014.

sisi variannya, program keagamaan di CRS lebih sedikit dibanding di MA. *CRS Rice Bowl*, sebuah program di hari Paskah, merupakan program keagamaan dari dan untuk umat Katolik yang cukup terkenal di CRS. Program ini diberi label *faith-in-action program* yang dapat dimanfaatkan untuk menolong keluarga dan komunitas seiman yang dikemas dalam tiga bentuk kegiatan: berdoa, berpuasa, dan memberikan sumbangan.<sup>19</sup>

Meskipun terdapat program khusus keagamaan, porsi program keagamaan di CRS dan MA sangat kecil dibandingkan dengan program kemanusiaannya. Sebagai gambaran umum, misalnya, dana masuk untuk program donasi keagamaan (*religious dues*) di MA pada tahun 2012 berjumlah £ 1,969,540, sementara itu donasi untuk program tanggap darurat sebesar £ 11,198,165 dan untuk program kesehatan terbilang £ 3,611,928. (Report of the Trustees and Financial Statements, 31 December 2012) Di CRS, prosentase dana yang diperuntukkan bagi kegiatan khusus umat Katholik jauh sangat kecil dibanding di MA. Misalnya, dana program *Rice Bowl* tahun 2010, yang peruntukannya telah di sebut di atas, hanya sebesar 0.62% (US \$ 5.652.000) dari total dana program (US \$ 918.950.000). (CRS Financial Summary 2010) Pada tahun 2013 prosentasenya meningkat menjadi 1.24% (US \$ 754.900.000) dari total dana program (US \$ 606.002.000).<sup>20</sup>

Dari sisi sumberdaya manusia, staf internasional MA masih banyak didominasi oleh staf yang beragama Islam. Meskipun demikian, kadang-kadang ada anggota *board of trustees* yang beragama selain Islam. Pada saat penelitian ini dilakukan, pimpinan program tanggap darurat di tingkat internasional adalah seorang non-Muslim. Dari sisi aturannya, pada prinsipnya staf MA boleh non-Muslim, kecuali untuk posisi *human resource development* (HRD). Untuk posisi HRD bahkan ada syarat memiliki pengetahuan keislaman yang memadai. Di Indonesia, kepala kantor MA di Jakarta dan Yogyakarta pernah ditempati oleh non-Muslim. Keduanya kebetulan warga negara asing yang dikirim ke Indonesia oleh MA pusat. Pada saat penelitian ini

---

<sup>19</sup> <http://www.csricebowl.org> diakses 14 Maret 2014.

<sup>20</sup> CRS Financial Report, September 30, 2013.

dilakukan, semua staf MA di Indonesia beragama Islam.<sup>21</sup> Sementara itu, sebagai lembaga berbasis Katolik, staf CRS di negara-negara Barat pada umumnya memang banyak didominasi oleh staf yang beragama Katolik, Kristen, atau sekuler (agnostik). Meskipun demikian tidak sulit menemukan orang Islam menjadi staf CRS di tingkat internasional, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti di Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Irak, dan lain-lain. Saat penelitian ini dilakukan CRS di Indonesia memiliki 11 staf dimana 8 orang diantaranya Muslim, 2 orang beragama Katolik, dan 1 staf beragama Budha.<sup>22</sup> Seorang staf CRS Indonesia menyebutkan pengenalan tentang identitas ke-Katolik-an, meskipun tetap terbuka, di CRS Indonesia semakin ditekankan kepada para staf dan menjadi salah satu bahan pelatihan staf internal. Diantara pengenalan tersebut menyangkut struktur gereja Katolik, beberapa konsep dasar kelembagaan, hal-hal istilah teknis seperti pastor, uskup, dan seterusnya.<sup>23</sup>

#### **4. Tantangan dan Strategi**

Tulisan ini sengaja menggunakan istilah multikultur untuk membicarakan perbedaan respon umat beragama. Respon umat beragama yang sama cukup beragam dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kasus ke kasus lain. Artinya, sama-sama umat Muslim, tetapi mereka memiliki respon yang berbeda terhadap FBNGO berbasis Kristiani. Sebaliknya juga, sama-sama umat Kristiani, tetapi mereka memiliki respon yang berbeda terhadap FBNGO berbasis Muslim. Aspek keragaman kultur dalam merespon FBNGO inilah yang ingin penulis tangkap dengan penggunaan istilah multikultur daripada multireligius.

Dalam kerja-kerja humanitarian, baik MA maupun CRS merasakan tantangan tidak banyak muncul dari aspek keagamaan. Meskipun demikian aktivis MA dan CRS, setidaknya yang kami wawancarai, sepakat bahwa agama bisa jadi isu yang sangat sensitif di lapangan. MA tidak pernah mengalami masalah terkait isu keagamaan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan WY dan AF, Juli 2014.

<sup>22</sup> Wawancara dengan MJ, Oktober 2014.

<sup>23</sup> Wawancara MJ, Oktober 2014.

yang berarti selama menjalankan programnya di Indonesia. Di Filipina MA –Filipina termasuk cakupan regional MA Indonesia—pernah mengalami masalah tidak dengan masyarakat, tetapi dengan lembaga donor. Pihak pendonor ingin mendonasikan dana untuk perbaikan rumah warga Muslim setelah bencana di sebuah daerah di Filipina selatan, tetapi menurut MA itu tidak mungkin. MA berpandangan hal tersebut akan menyulut konflik dan kecemburuan di masyarakat. Sebab yang membutuhkan perbaikan rumah bukan hanya warga Muslim, tapi juga mereka yang non-Muslim. Karena tidak ada titik temu antara pihak pendonor dan MA, kemudian MA menolak donor tersebut.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan tantangan multikultur yang dihadapi oleh FBNGO tidak selamanya berasal dari bawah (masyarakat, penyintas), tetapi kadang-kadang dari atas (pendonor).

Pada umumnya program CRS juga berjalan lancar di lapangan, tanpa menghadapi tantangan berarti. Selama satu dekade belakangan ini, CRS mengalami tiga kali tantangan saat mengimplementasikan programnya di lapangan. Satu tantangan muncul di masyarakat dengan latar belakang penduduk mayoritas Protestan sangat kuat di sebuah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2000an. Masyarakat menolak CRS dan akhirnya tidak ada titik temu. Kemudian implementasi program dipindahkan ke daerah lain yang bisa menerima.<sup>25</sup> Tantangan kedua dan ketiga muncul bersamaan dengan program pasca tsunami di Aceh 2005 dan gempa di Padang 2009.<sup>26</sup> Dalam kasus di NTT di atas menunjukkan tantangan keagamaan yang dihadapi FBNGO tidak selalu muncul dari agama lain, tapi juga bisa dari satu agama dengan perbedaan kultur, aliran, atau golongan keagamaan.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat penerima manfaat dan dalam mengimplementasikan program-programnya, MA dan CRS menerapkan strategi aturan atau kebijakan yang dipegang kuat oleh lembaga humaniter internasional: Sphere dan HAP.<sup>27</sup> *Pertama*, Sphere merupakan standar minimal yang perlu dipegangi oleh para praktisi humanitarian dalam aksi-aksi kemanusiannya. Menengok sejarah

---

<sup>24</sup> Wawancara WY dan AF, Juli 2014.

<sup>25</sup> Wawancara MJ, Oktober 2014.

<sup>26</sup> Wawancara SR, Juli 2014 dan wawancara MJ, Oktober 2014.

<sup>27</sup> Wawancara SR, Juli 2014 dan wawancara WY dan AF, Juli 2014.

gerakan humanitarian yang sangat panjang, Sphere muncul relatif baru sejak tahun 1997. Meskipun apakah sebuah lembaga humaniter mengikatkan diri atau tidak terhadap prinsip yang dirumuskan Sphere bersifat sukarela, pada kenyataannya Sphere saat ini telah menjadi standar paling luas yang diikuti oleh praktisi gerakan humanitarian.<sup>28</sup> Salah satu penanda gerakan Sphere yang paling fundamental adalah disusunnya “Piagam Kemanusiaan” (*the Humanitarian Charter*) dan “Standar-standar Minimum dalam Respons Kemanusiaan (*the Minimum Standards in Humanitarian Response*)” atau sering disebut lebih singkat “the Sphere Handbook” yang terakhir telah direvisi pada tahun 2011.

Piagam Kemanusiaan merupakan dasar etis dan hukum serta prinsip-prinsip hak dan kewajiban. Menurut Piagam Kemanusiaan bahwa “*all people affected by disaster or conflict have a right to receive protection and assistance to ensure the basic conditions for life with dignity* (semua orang yang terkena dampak bencana dan konflik memiliki hak untuk menerima perlindungan dan bantuan yang menjamin kebutuhan dasar untuk hidup dengan bermartabat).” Secara lebih rinci, namun padat, hak tersebut diturunkan dalam tiga prinsip: (a) hak untuk hidup dengan bermartabat; (b) hak untuk menerima bantuan kemanusiaan; (c) hak perlindungan dan keamanan. Oleh sebab itu, bila CRS dan MA mengikuti Piagam Kemanusiaan mereka harus tetap melindungi para penyintas yang mereka bantu dari persuasi keagamaan, karena hal itu mengganggu martabat penyintas. Pada poin keenam Piagam Kemanusiaan ditegaskan tentang prinsip imparialitas dan non-dikriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama.<sup>29</sup>

Sedangkan The Sphere Handbook antara lain berisi kerangka konseptual dari piagam kemanusiaan, dasar moral dan hukum, konsep-konsep kunci, empat prinsip perlindungan, dan beberapa contoh standar minimum dalam bidang: air bersih, sanitasi, keamanan pangan, hunian sementara, perumahan, dan seterusnya.<sup>30</sup> Sebagaimana disebut sebelumnya standar dalam Sphere ini sangat dipegangi oleh CRS

---

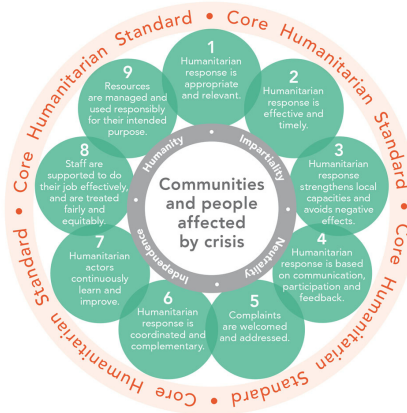
<sup>28</sup> <http://www.sphereproject.org/> diakses pada 1 April 2014.

<sup>29</sup> Dokumen the Humanitarian Charter.

<sup>30</sup> Dokumen the Sphere Handbook 2011



dan MA. Bahkan CRS Indonesia menjadi salah satu lembaga yang memprakarsai deseminasi Sphere di Indonesia. Standar inti tersebut digambarkan dalam bagan di bawah nanti.



Bagan: Standar Minimal Humanitarian  
(Sumber: *The Sphere Handbook 2011*)

Meskipun menerapkan standar humanitarian seperti Sphere dan HAP, namun pada praktiknya tantangan kadang-kadang tetap dihadapi di lapangan. Pada saat melakukan kerja-kerja darurat pasca gempa Padang 2009, CRS menghadapi masalah karena identitas keagamaan. CRS ditolak di sebuah desa di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beberapa orang di desa tersebut berinisiasi menolak bantuan CRS karena kekhawatiran Kristenisasi. Akhirnya CRS pindah ke desa-desa sebelahnya. Setelah program terlihat manfaatnya, kemudian sebagian masyarakat meminta CRS membantu desa yang tadinya menolak tersebut.<sup>31</sup>

Menyadari sensitifitas isu keagamaan dalam kerja-kerja humanitarian di lapangan, MA dan terutama CRS terdorong menggunakan strategi yang proporsional dalam menampilkan diri di masyarakat. Misalnya, dalam kerja *emergency* biasanya tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan tentang identitas lembaga sebagai FBNGO. Apabila bekerja dalam situasi *emergency* di daerah Kristiani, seperti di sebagian Indoonesia bagian timur, maka tim CRS menggunakan t-shirt

<sup>31</sup> Wawancara MJ, Oktober 2014.

atau media dengan logo “CRS Catholic Relief Services”. Sementara itu di daerah Muslim, seperti di sebagian Jawa dan Sumatera, mereka menggunakannya dengan logo “CRS” saja. Selain dua jenis tulisan tersebut, ada satu logo “CRS Catholic Relief Services” *plus* simbol “salib”. Logo mana yang dipakai di lapangan diputuskan oleh tim CRS Indonesia sendiri, tidak ada ketentuan khusus dari CRS pusat. Satu prinsip yang dipegangi dalam konteks ini adalah keinginan CRS untuk melindungi staf dan patnernya.<sup>32</sup> MA juga memegang prinsip yang sama dengan CRS dalam hal penampilan nama lembaga dan logonya di lapangan. Tetapi MA tidak pernah tidak memakai kata “Muslim” di lapangan di Indonesia, karena tidak ada sensitifitas yang berarti terhadap lembaga keislaman di negara ini. Jadi MA selalu menggunakan logo lengkap “Muslim Aid”, bukan hanya singkatannya/ MA.<sup>33</sup>

### C. Simpulan

Meskipun Indonesia mulai menjadi salah satu *emerging country* yang semakin diperhitungkan dalam percaturan ekonomi internasional, masih cukup banyak international NGO yang bekerja di Indonesia. Salah satu tipe NGO tersebut adalah NGO yang berdasarkan agama atau *faith based* NGO (FBNGO). Dua FBNGO yang menjadi bahasan tulisan ini, Catholic Relief Services (CRS) dan Muslim Aid (MA), memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia. Menurut taxonomi lembaga humanitarian yang dijelaskan di atas, baik MA maupun CRS dapat diklasifikasikan dalam kategori sintesis humanitarian. Posisi CRS dan MA yang merupakan lembaga humaniter yang mengedepankan semangat religius *cum* humanis menjadi modal dasar kerja mereka di Indonesia yang multikultur. Kedua lembaga ini juga memegang kuat prinsip-prinsip dan standar-stadar humanitarian internasional, termasuk dalam berkomunikasi dengan para penyintas. Meskipun demikian, tidak berarti CRS dan MA tidak menghadapi tantangan di lapangan, termasuk yang berkaitan dengan identitas agama yang sensitif. Oleh karena itu, dua FBNGO ini terdorong mengembangkan strategi bagaimana mengatasi masalah akibat sensitifitas agama yang kadang-kadang muncul di lapangan.

---

<sup>32</sup> Wawancara MJ, Oktober 2014 dan wawancara SR, Juli 2014

<sup>33</sup> Wawancara WY dan wawancara AF Juli 2014

## DAFTAR PUSTAKA

- Barret, D.B. dan Johnson, T.M. (2002). "A Statitical Approach to the World's Religious Adherents, 2000-2050 C.E.", dalam Melton, J.B. and Baumann, M. *Religion of the World A Comprehensive Ensylopedia of Beliefs and Practices*, Santa Barbara: Abc Clio, hlm. xxvii-xxxviii.
- Kemkens, L. (2013). *On the Connection between Religion and Disaster: Literature Review*, Yogyakarta: CRCS UGM
- Latief, H. (2012). *Islamic Charities and Social Activism Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia*. Desertasi doktoral di Universitas Utrecht Belanda. Utrecht: Universitas Utrecht.
- McLuhan, M. (2011). *The Gutenberg Galaxy*. Toronto: The University of Toronto Press.
- Meuleman, J. (2011) "Dakwah, competition for authority, and development". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, No. 2/3, hlm. 236-269.
- Patrick Sookhdeo, P. (2009). *The challenge of Islam to the Church And its Mission*. VA: Isaac Publishing.
- Suhadi. (2013). "Religious Emergence in Post-Tsunami Japan 2011 and Religious/Cultural Humanitarian Diplomacy". *Multiversa*, No. 3 Desember 2013, Vol. 03.
- Suhadi, C. dan E. Rubi. (2012). "Agama atau Kemanusiaan? Analisa Diskursus Dalam Bencana Alam di Media Cyber" dalam Indiyanto dan Kuswanjono. *Respons Masyarakat Lokal atas Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya*. Yogyakarta: CRCS dan Mizan.
- Suhadi. (2011). "Erupsi Merapi 2010 dan Kaum Santri: Kajian Eksploratif tentang Resilien Kaum Santri" dalam Hartono, et. al. *Merapi dalam Kajian Multidisiplin: Sumbangan Pemikiran Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada bagi Korban Erupsi Merapi tahun 2010*. Yogyakarta: SPs UGM.

- Thaut L.C. (2009). “The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies: Constructing the Taxonomy”. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 20, No. 4 (December 2009), hlm. 319-350.
- Wenda, T. (2013) “Islamisasi Papua Semakin Gencar, Gereja Berdiam Diri”, <http://suarabaptis.blogspot.com/2013/05/islamisasi-papua-semakin-gencar-gereja.html>, diakses pada 27 Maret 2014.